

Intervensi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam Pengembangan Kelompok Tani Aloe Vera

Fira Murdita¹, Sanggar Tribuana T. D.², Ruhilda Utami³, Mifta Fania Salsabila⁴, Dini Rahma⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
20-04-2025

Direvisi:
10-03-2026

Diterima:
14-04-2026

Keywords

: *Policy Intervention, Farmer Empowerment, Aloe Vera, Peatlands, Public Administration*

ABSTRACT

This study aims to analyze the form, effectiveness, and determinant factors of the Pontianak City Government's policy intervention in restoring and empowering aloe vera farmer groups. Utilizing a descriptive qualitative research design, this study is focused in the North Pontianak District. Data collection was conducted through in-depth interviews with farmer representatives and officials from the Department of Food, Agriculture, and Fisheries (DPPP), along with field observations and documentation studies. The research findings indicate that the Pontianak City Government has implemented four dimensions of structural intervention: production facilities and infrastructure assistance (including the distribution of operational vehicles to overcome upstream logistical constraints), training programs for derivative product diversification and multiculture planting patterns, marketing facilitation through the integration of the Aloe Vera Center ecosystem, and comprehensive capital access assistance. The discussion reveals that this intervention has proven effective in restoring farmers' fundamental motivation and operational mobility in the short term. Nevertheless, long-term effectiveness is still hindered by the slow adaptation to post-harvest technology, market price disparities, and suboptimal institutional synergy between the upstream and downstream industrial sectors. This study concludes that empowering urban farmers requires a paradigm shift from a charitable approach to participatory ecosystem governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, serta faktor determinan dari intervensi kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam memulihkan dan memberdayakan kelompok tani lidah buaya. Menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, studi ini difokuskan di Kecamatan Pontianak Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan petani dan pejabat Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP), serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah mengimplementasikan empat dimensi intervensi struktural: bantuan sarana dan prasarana produksi (termasuk distribusi kendaraan operasional untuk mengatasi kendala logistik hulu), program pelatihan diversifikasi produk turunan dan pola tanam multikultur, fasilitasi pemasaran melalui integrasi ekosistem Aloe Vera Center, serta bantuan akses permodalan yang komprehensif. Pembahasan mengungkap bahwa intervensi ini terbukti efektif dalam memulihkan motivasi fundamental dan mobilitas operasional petani dalam jangka pendek. Akan tetapi, efektivitas jangka panjang masih terhambat oleh lambatnya adaptasi teknologi pascapanen, disparitas harga pasar, dan belum optimalnya sinergi kelembagaan antara sektor hulu dan hilir industri. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani perkotaan memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju tata kelola ekosistem yang partisipatif.

Kata Kunci

: *Intervensi Kebijakan, Pemberdayaan Petani, Lidah Buaya, Lahan Gambut, Administrasi Publik.*

Corresponding Author

: Sanggar Tribuana T. D, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat Indonesia, e-mail: sanggartribuana12@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertanian dalam lanskap perkotaan dan peri-urban di Indonesia menyajikan dinamika yang kompleks, menuntut pendekatan kebijakan publik yang presisi, adaptif, dan berkelanjutan. Manifestasi keberhasilan adaptasi komoditas pertanian terhadap kondisi ekologis spesifik perkotaan dapat dilihat pada budidaya lidah buaya (*Aloe chinensis Baker*) di lahan gambut Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tanaman hortikultura ini tidak hanya memiliki nilai agronomis dan ekonomis yang tinggi, tetapi secara historis telah bertransformasi menjadi identitas kultural dan ikon unggulan daerah. Secara geografis, Kecamatan Pontianak Utara, khususnya di wilayah Kelurahan Siantan Hulu, merupakan episentrum utama budidaya lidah buaya. Karakteristik topografi lahan gambut di kawasan ini memiliki tingkat keasaman, porositas, dan retensi air yang secara alamiah sangat mendukung pertumbuhan komoditas lidah buaya secara optimal, (Nuraini et al., 2018)

Secara kuantitatif, potensi lahan untuk budidaya lidah buaya di Kota Pontianak mencapai sekitar 1.100 hektare dari total hamparan lahan gambut yang ada, menjadikannya salah satu kawasan pengembangan hortikultura paling prospektif di Pulau Kalimantan. Pada masa keemasannya sebelum pandemi COVID-19 melanda, produksi lidah buaya Pontianak mampu menembus angka impresif hingga 19.000 ton per tahun, yang tidak hanya menyuplai kebutuhan konsumsi lokal tetapi juga menjadi bahan baku bagi industri makanan, minuman, dan kosmetik berskala nasional, (A'an, 2024) Keberadaan *Aloe Vera Center* di Pontianak Utara sebagai pusat riset, agrowisata, dan etalase produk menjadi monumen yang membuktikan betapa komoditas ini pernah menjadi tulang punggung perekonomian komunal, (Gema Mahardhika, 2023) Berbagai produk turunan dari Industri Kecil Menengah (IKM), mulai dari minuman jeli kemasan, dodol, teh, hingga bahan baku produk perawatan kulit, telah dikembangkan secara masif dan menciptakan rantai nilai tambah ekonomi yang memutar roda kehidupan ribuan keluarga petani dan pengrajin setempat.

Meskipun memiliki rekam jejak historis yang gemilang, ekosistem agribisnis lidah buaya di Pontianak Utara saat ini sedang dihadapkan pada turbulensi struktural yang mengancam keberlanjutan usahanya. Guncangan ekonomi makro yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 telah menciptakan efek domino yang mematikan, menjalar dari sektor hilir yang kehilangan daya beli hingga ke sektor hulu yang kehilangan serapan pasar, menyebabkan budidaya komoditas ini sempat berada dalam kondisi stagnan atau "mati suri". Tantangan yang dihadapi oleh kelompok tani setempat kini menjadi semakin kompleks, multidimensional, dan saling berkelindan satu sama lain.

Tantangan pertama yang paling mendesak adalah fluktuasi harga pasar yang berbenturan langsung dengan biaya produksi. Kenaikan harga sarana produksi pertanian (saprodi), termasuk pupuk dan obat-obatan, tidak diimbangi dengan stabilitas harga jual daun lidah buaya segar di tingkat petani. Tingginya risiko kerugian pada pola tanam monokultur telah memaksa sebagian petani untuk bersikap pragmatis dengan memodifikasi pendekatan agronomis mereka menjadi pola tanam multikultur modern, (Hayati et al., 2025) seperti menjadikan tanama aloe vera menjadi obat luka sembuh, (Ananda & Zuhrotun, 2017), menjadi bahan baku kecantikan, (Ningsih & Ambarwati, 2021), sebagai antimikroba dalam menghambat pertumbuhan beberapa fungi, (Wijaya & Masfufatun, 2022). Petani juga harus mulai menyisipkan tanaman pendamping yang memiliki siklus panen lebih cepat dan nilai ekonomis yang relatif lebih stabil, seperti komoditas pepaya, di sela-sela tegakan lidah buaya untuk memaksimalkan pendapatan marginal dan memitigasi risiko kebangkrutan. Namun demikian, apabila harga pasar komoditas utama tidak kunjung mencerminkan margin keuntungan yang wajar di atas biaya produksi, motivasi rasional petani untuk merevitalisasi kebun lidah buaya mereka akan terus merosot, (Harmanta, 2025)

Tantangan kedua berkaitan dengan degradasi infrastruktur dan hambatan logistik yang melumpuhkan mobilitas ekonomi. Kendala fundamental yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian petani di kawasan lahan gambut adalah persoalan sarana transportasi. Berdasarkan realitas di lapangan, banyak kelompok tani yang mengalami masa vakum dalam aktivitas pemasaran keliling akibat rusaknya kendaraan operasional, seperti motor roda tiga (*tossa*), yang usianya telah melebihi satu dekade dan tidak lagi layak pakai. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai, distribusi daun segar dari lahan-lahan gambut yang terpelosok menuju pusat-pusat pengolahan IKM maupun pasar tradisional menjadi sangat terhambat, memicu tingginya tingkat pembusukan pascapanen.

Tantangan ketiga adalah kegagalan integrasi sistemik antara sektor hulu dan hilir (fenomena *Huluisasi dan Hilirisasi* yang asimetris). Terputusnya rantai komunikasi dan relasi bisnis jangka panjang antara petani sebagai entitas hulu dengan pelaku industri pengolahan, sektor perhotelan, dan restoran sebagai entitas hilir telah menciptakan anomali pasar. Hasil panen sering kali menumpuk dan tidak terserap oleh pasar karena ketiadaan kontrak pembelian yang mengikat. Penurunan daya beli masyarakat secara umum selama dan setelah pandemi semakin memperburuk situasi ini, membatasi ruang gerak IKM untuk berekspansi atau bahkan sekadar mempertahankan kapasitas produksi dasar harian mereka.

Tantangan keempat melibatkan kerentanan ekologis dan iklim. Mengelola pertanian di lahan gambut menuntut teknik silvikultur dan budidaya yang sangat spesifik dan presisi. Perubahan cuaca ekstrem dapat secara drastis mempengaruhi ketersediaan air tanah di lahan gambut, memicu tingkat keasaman tanah yang berfluktuasi secara merugikan, serta mengundang serangan hama yang spesifik pada kondisi kelembaban tertentu. Selain itu, tingkat pendidikan dan demografi petani yang didominasi oleh kelompok usia lanjut memperlambat laju adaptasi terhadap inovasi teknologi penanganan pascapanen, membatasi kemampuan kelompok tani untuk melakukan diversifikasi produk secara mandiri, (Harmanta, 2025)

Menghadapi manifestasi kegagalan pasar (*market failure*) dan stagnasi sistemik ini, kehadiran intervensi kebijakan publik dari pemerintah daerah menjadi sebuah imperatif rasional yang tidak dapat dihindari. Dalam kerangka teori ekonomi institusional dan kebijakan publik tata kelola pertanian, intervensi negara secara teoretis dilegitimasi oleh kebutuhan mendesak untuk menyediakan barang publik, mengoreksi asimetri informasi antara produsen dan konsumen, serta menstabilkan guncangan harga di pasar, (Sihombing, 2022). Secara konseptual, kebijakan pembangunan pertanian yang dirumuskan oleh pemerintah harus membidik dua tujuan yang saling melengkapi. Dalam jangka pendek pembangunan pertanian bertujuan untuk memacu laju pertumbuhan produksi, sedangkan dalam dimensi jangka panjang, kebijakan tersebut harus mampu memberikan kepastian, stabilitas, dan jaminan kelangsungan usaha bagi para pelakunya. Lebih jauh lagi, intervensi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat pedesaan atau peri-urban tidak boleh hanya direduksi menjadi transfer sumber daya yang bersifat amal atau karitatif semata. Ia harus dikonstruksikan sebagai sebuah proses kolektif yang berkelanjutan untuk membangun kemandirian, memperkuat struktur sosial-ekonomi komunitas lokal, dan mendongkrak kapasitas dasar (*knowledge, skill, ability*) petani, (Rivai & Anugrah, 2016)

Pemerintah Kota Pontianak, melalui instrumen birokrasinya yaitu Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP), menyadari sepenuhnya urgensi intervensi tersebut. Serangkaian narasi kebijakan dan program mulai digulirkan untuk membendung kejatuhan sektor ini. Salah satu inisiatif yang dicanangkan dikemas dalam jargon programatis yang unik, yaitu "Cinta Lidah Buaya Bersemi Kembali" (CLBK), (Harmanta, 2025). Langkah ini menunjukkan kristalisasi *political will* yang kuat dari kepala daerah untuk merevitalisasi komoditas yang sempat mati suri. Akan tetapi, kemauan politik semata tidak akan pernah cukup

untuk meruntuhkan tembok kendala struktural. Kemauan tersebut harus dioperasionalkan ke dalam serangkaian instrumen kebijakan yang terkalibrasi secara cermat, mulai dari injeksi sarana fisik dan modal, diseminasi teknologi budidaya, hingga rekayasa sosial yang bertujuan membangun kembali jaringan komunikasi dan struktur tata niaga pasar.

Di ranah akademis, meskipun telah banyak studi terdahulu yang mengupas secara ekstensif mengenai aspek agronomis dan kelayakan finansial budidaya lidah buaya di lahan gambut Pontianak, masih terdapat celah literatur (*literature gap*) yang sangat menganga terkait dengan analisis empiris dari perspektif kebijakan publik. Belum banyak literatur yang secara komprehensif membedah bagaimana arsitektur intervensi kebijakan publik dijalankan oleh entitas pemerintah daerah pada masa pemulihan pascapandemi, serta sejauh mana efektivitas intervensi tersebut dalam memecahkan kebekuan struktural yang dialami oleh kelompok tani. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengelaborasi titik temu antara kebijakan publik, sosiologi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang empiris dan konseptual yang telah diuraikan secara mendalam, penelitian ini merumuskan dua masalah utama. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk intervensi kebijakan yang diimplementasikan secara empiris oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka pemulihan dan pengembangan kelompok tani lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara? Kedua, sejauh mana tingkat efektivitas dari berbagai instrumen kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah sosio-ekonomi yang membelenggu petani, serta apa saja faktor struktural maupun kultural yang menjadi pendukung dan penghambat implementasinya? Secara terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara holistik dan komprehensif bentuk-bentuk intervensi kebijakan Pemerintah Kota Pontianak terhadap kelompok tani lidah buaya. Selain itu, studi ini juga diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan paradigma teori pemberdayaan masyarakat dan kebijakan publik, guna merumuskan rekomendasi praktis dan strategis bagi penyempurnaan desain kebijakan pertanian perkotaan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab kompleksitas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, studi ini mengadopsi desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus induktif. Paradigma kualitatif dipilih secara filosofis karena penelitian ini berupaya untuk memahami makna, dinamika sosial, dan proses berjalannya implementasi kebijakan secara mendalam (*in-depth understanding*) di lapangan, dan bukan sekadar mengukur variabel-variabel kuantitatif secara matematis atau statistik, (Anggela, 2011) Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas relasi sosial yang tidak kasat mata, keluhan yang tidak terucapkan secara formal, motivasi intrinsik, serta pola interaksi struktural antara birokrasi pemerintah sebagai perumus kebijakan dan komunitas akar rumput (petani) sebagai penerima manfaat. Melalui lensa deskriptif-analitis ini, penelitian ini berupaya memotret fenomena aktual tentang intervensi kebijakan publik dan mengekstraksi makna teoretis yang mendalam dari realitas empiris tersebut.

Lokasi penelitian secara sengaja (*purposive*) difokuskan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Penentuan batas-batas geografis lokasi ini didasarkan pada signifikansi historis dan ekologis wilayah tersebut. Secara khusus, Kelurahan Siantan Hulu di dalam kecamatan tersebut merupakan episentrum alamiah bagi budidaya lidah buaya di atas lanskap ekosistem gambut. Kawasan ini merupakan basis operasional bagi berbagai gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang vital, termasuk Kelompok Tani (Poktan) Bentasan, serta menjadi lokasi fisik berdirinya fasilitas strategis pemerintah

daerah, yaitu *Aloe Vera Center*. Kepadatan aktivitas agribisnis dan tingginya intervensi program di wilayah ini menjadikannya laboratorium sosial yang sangat representatif untuk mengkaji efektivitas kebijakan publik secara menyeluruh.

Dalam upaya memastikan kedalaman substansi dan keabsahan informasi yang dikumpulkan, peneliti mengakuisisi dua jenis data utama yang dirancang untuk saling melengkapi dan menguji satu sama lain melalui mekanisme triangulasi sumber. Data primer diperoleh secara langsung dari kancah lapangan melalui interaksi tatap muka dengan informan kunci. Informan kunci tidak dipilih secara acak, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mensyaratkan kriteria penguasaan informasi mendalam mengenai fokus penelitian. Informan ini diklasifikasikan ke dalam dua unsur utama. Unsur pertama adalah representasi birokrasi, yang mencakup pejabat struktural, pembuat keputusan strategis, dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak, termasuk para tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memiliki wilayah binaan definitif di Kecamatan Pontianak Utara. Unsur kedua adalah masyarakat sasaran kebijakan, yang direpresentasikan oleh para ketua dan anggota inti dari berbagai kelompok tani lidah buaya yang merasakan langsung dampak (baik positif maupun negatif) dari kebijakan yang diimplementasikan (seperti representasi dari Poktan Bentasan), serta para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjalankan roda bisnis pengolahan produk turunan lidah buaya. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari proses penelaahan yang sistematis terhadap dokumen-dokumen resmi. Ini mencakup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari DPPP, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait sektor pertanian, data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, berbagai artikel media massa lokal yang mempublikasikan rilis kebijakan Pemkot, serta literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah mutakhir dan buku teks standar yang relevan dengan diskursus teori kebijakan publik, manajemen rantai pasok, dan sosiologi pertanian.

Proses koleksi data di lapangan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan melalui tiga teknik utama yang khas dalam tradisi kualitatif. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini dikelola secara semi-terstruktur menggunakan instrumen pedoman wawancara yang bersifat fleksibel dan terbuka. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengartikulasikan perspektif emik (sudut pandang pelaku) dari para petani mengenai rintangan operasional yang nyata, sekaligus menelusuri logika institusional dari para aparatur sipil negara dalam merancang dan menjustifikasi program-program seperti inisiatif CLBK maupun pelibatan dalam Gerakan Pangan Murah (GPM). Teknik kedua adalah observasi partisipatoris pasif. Peneliti tidak hanya mendengarkan narasi, tetapi juga melakukan pengamatan secara langsung dengan mata kepala sendiri terhadap realitas objektif di lapangan. Ini meliputi pengamatan terhadap profil fisik lahan gambut, kelayakan fasilitas infrastruktur operasional yang krusial (seperti pengecekan kondisi riil kendaraan angkut motor roda tiga/tossa yang digunakan kelompok tani), ritme aktivitas keseharian para petani dalam mempraktikkan teknik budidaya, hingga proses kerja di fasilitas pengolahan pasca-panen di *Aloe Vera Center*. Teknik ketiga adalah studi dokumentasi, yang berfungsi untuk memverifikasi validitas silang dari data lisan. Peneliti mengumpulkan, menyortir, dan menelaah rekam jejak tertulis maupun arsip digital, termasuk siaran pers resmi dari portal Pemerintah Kota Pontianak yang menarasikan seremonial penyaluran bantuan sarana dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas kapasitas.

Setelah korpus data terkumpul dalam jumlah yang memadai, proses interpretasi dan analisis data dilakukan menggunakan kerangka analisis data kualitatif interaktif yang diadaptasi dari pemikiran metodologis Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dalam model ini bukanlah aktivitas linear yang dilakukan di akhir penelitian, melainkan proses siklikal yang

terjadi secara beriringan dengan pengumpulan data, mencakup tiga tahapan organik.¹⁵ Tahapan awal adalah reduksi data (*data condensation*). Pada fase ini, peneliti melakukan penyaringan, penyeleksian, dan pemfokusan dari tumpukan data mentah yang berupa transkrip wawancara panjang dan catatan lapangan yang ekstensif. Narasi dan anekdot yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pertanyaan penelitian dipilah dan dikesampingkan, sementara data-data yang memiliki muatan esensial dikodekan (*coding*) ke dalam berbagai kategori tematik konseptual (misalnya tema: "Injeksi Bantuan Fisik", "Hambatan Birokrasi Logistik", dan "Sinergi Kelembagaan"). Tahapan kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah melewati proses kondensasi kemudian direkonstruksi dan diorganisasikan ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, matriks relasional, maupun bagan konseptual. Pola pengorganisasian ini sangat krusial karena memudahkan peneliti untuk melihat bangunan fenomena secara utuh, melacak pola hubungan sebab-akibat, serta mengidentifikasi tautan logis antara satu intervensi pemerintah dengan respons perilaku petani di lapangan. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berangkat dari konstelasi pola yang muncul secara konsisten dari tahapan penyajian data, peneliti merumuskan berbagai proposisi teoretis dan kesimpulan awal. Namun demikian, kesimpulan ini tidak serta merta dianggap final. Ia wajib diuji kembali (diverifikasi) ketahanannya dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap anomali pada catatan lapangan, mencari kasus negatif, dan mengkonfirmasi secara diskursif melalui perbandingan dengan tinjauan literatur teori tata kelola kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Mekanisme perulangan ini secara metodologis bertujuan untuk menjamin tingkat keabsahan (*validity*), reliabilitas, serta objektivitas dari temuan penelitian kualitatif ini secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekskavasi data empiris di Kecamatan Pontianak Utara mengonfirmasi bahwa upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk mengurai benang kusut stagnasi produksi lidah buaya pascapandemi tidak dilakukan secara parsial, melainkan diwujudkan melalui sebuah arsitektur kebijakan struktural yang cukup komprehensif. Digerakkan oleh filosofi revitalisasi yang dikemas dalam program andalan berjudul "Cinta Lidah Buaya Bersemi Kembali" (CLBK), rangkaian intervensi yang dieksekusi oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) merangkul berbagai aspek hulu hingga hilir. Narasi temuan ini mengklasifikasikan manifestasi intervensi tersebut ke dalam empat dimensi operasional yang saling melengkapi satu sama lain.

A. Sarana Subsidi Tepat Sasaran Bantuan Sarana, Prasarana, dan Pemulihan Infrastruktur Pertanian

Kelumpuhan paling akut yang membelenggu kelompok tani di hamparan lahan gambut Pontianak Utara berakar pada degradasi masif sarana fisik. Kerusakan ini membatasi kapasitas ekspansi produksi dan secara langsung mematikan ruang gerak logistik mereka. Merespons diagnosis ini, intervensi infrastruktur dari pemerintah ditargetkan secara spesifik pada penyelesaian sumbatan operasional (*bottleneck*) yang paling kritis, yakni instrumen mobilitas dan pembaruan genetika tanaman. Penemuan krusial di lapangan menunjukkan bahwa vakumnya aktivitas pemasaran sirkuler yang biasa dilakukan oleh kelompok tani diakibatkan oleh kondisi kendaraan operasional motor roda tiga atau yang lazim disebut *tossa* yang usianya telah mencapai lebih dari 10 tahun dan rusak parah. Sebagai bentuk intervensi kuratif yang bersifat instan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendistribusikan armada unit *tossa* baru kepada 10 kelompok tani unggulan yang terverifikasi di Kecamatan Pontianak Utara. Injeksi aset fisik ini secara seketika merevitalisasi mobilitas logistik petani, memulihkan

kemampuan mereka untuk mengangkut hasil panen dari lahan yang sulit diakses menuju pasar komersial di pusat perkotaan, (A'an, 2024)

Seiring dengan pemulihan sarana logistik, intervensi juga merambah pada perbaikan faktor produksi di tingkat lahan. Mengingat banyak hamparan tanaman lidah buaya yang dibiarkan terbengkalai selama masa pandemi hingga melewati fase usia produktif optimalnya, pemerintah menginisiasi program hibah benih berskala besar. Bantuan ini berwujud ribuan bibit varietas *Aloe chinensis Baker* unggul yang telah tersertifikasi. Untuk menopang pertumbuhan bibit tersebut pada ekosistem gambut yang memiliki keasaman tinggi, DPPP juga mendistribusikan subsidi pupuk hayati khusus serta kapur dolomit yang berfungsi sebagai agen amelioran untuk merekayasa dan menetralkan pH tanah. Detail klasifikasi bantuan sarana produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Detail Klasifikasi Bantuan Sarana Produksi,

No	Kategori Intervensi Fisik	Jenis Bantuan Spesifik	Target Sasaran Program	Tujuan Objektif Kebijakan
1	Infrastruktur Logistik	Kendaraan motor roda tiga (tossa) baru.	10 Kelompok Tani Unggulan di Pontianak Utara.	Memulihkan mobilitas distribusi pascapanen dan mengaktifkan kembali pemasaran keliling.
2	Bioteknologi Pertanian	Bibit <i>Aloe chinensis Baker</i> bersertifikat.	Anggota kelompok tani aktif yang memiliki lahan non-produktif.	Meremajakan usia tanaman komoditas untuk meningkatkan produktivitas tonase panen.
3	Ameliorasi Lahan	Kapur dolomit dan pupuk subsidi khusus lahan gambut.	Petani penggarap lahan gambut di wilayah Siantan Hulu.	Mengoreksi keasaman tanah (pH) lahan gambut pasca-vakum agar ideal bagi bibit baru.
4	Mekanisasi Sederhana	Pompa air portabel dan mesin pencacah gulma.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat kelurahan.	Efisiensi tenaga kerja (menurunkan labor cost) dan mitigasi krisis air saat musim kemarau ekstrem.

B. Program Pelatihan, Penyuluhan, dan Rekayasa Kapasitas SDM

Intervensi fisik yang massif disadari tidak akan mampu memberikan jaminan keberlanjutan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bantuan barang tanpa suntikan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan teknis (*skill*) berisiko tinggi menghasilkan solusi berumur pendek. Oleh karena itu, DPPP mengintegrasikan dimensi edukasi melalui program penyuluhan yang terstruktur dan responsif terhadap dinamika iklim maupun pasar.

Pendekatan penyuluhan pertama menargetkan adaptasi agronomis melalui pergeseran paradigma pola tanam. Berangkat dari analisis kerentanan ekonomi yang dipicu oleh fluktuasi harga global lidah buaya, tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara agresif mendiseminasikan inovasi pola tanam multikultur. Para petani diedukasi secara intensif untuk tidak lagi menaruh seluruh tumpuan ekonomi pada pola monokultur yang berisiko tinggi. Sebaliknya, mereka didorong untuk mengintegrasikan tanaman pendamping yang memiliki siklus panen berbeda dan nilai eceran yang lebih konstan, seperti penanaman pepaya atau komoditas sayuran daun, di sela-sela area lidah buaya. Strategi rasional ini diorkestrasi sebagai *buffer* (penyangga) arus kas komunal; sehingga saat harga daun lidah buaya jatuh bebas di pasaran, petani masih tetap memiliki instrumen pendapatan alternatif untuk membiayai operasional lahan. Di ranah hilir, pemerintah memfasilitasi program pelatihan diversifikasi produk olahan pasca-panen secara massif, dengan menjadikan *Aloe Vera Center* sebagai laboratorium utamanya. Melalui kolaborasi lintas institusi dengan pihak akademisi perguruan

tinggi dan instruktur dari pelaku IKM yang telah stabil, petani dengan penekanan partisipasi pada Kelompok Wanita Tani (KWT) dilatih secara komprehensif menggunakan modul Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan inovatif, (Aji, 2021) Silabus pelatihan tidak lagi mandek pada keterampilan konvensional seperti pembuatan minuman jeli atau manisan. Kurikulum pelatihan telah berevolusi dan diarahkan pada formulasi teknis pembuatan produk bernilai tambah eksponensial seperti sabun organik cair, *lotion* perawatan tubuh, dan ekstrak bahan baku kosmetika yang tren permintaannya sedang mengalami lonjakan (*booming*) tajam di pasar ritel modern.

No	Modul Pelatihan SDM	Fokus Keterampilan Utama	Aktor Pelaksana & Fasilitator	Dampak yang Diharapkan
1	Agronomi Adaptif	Transisi dari pola monokultur menuju pola tanam multikultur (integrasi pepaya). ⁷	Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan DPPP.	Diversifikasi risiko kegagalan panen dan stabilisasi pendapatan kas bulanan petani.
2	Hilirisasi Konvensional	Standarisasi higienitas pembuatan produk makanan dan minuman (jeli, dodol, teh). ¹	Dinas Perindustrian, Akademisi, dan Instruktur IKM lokal.	Meningkatkan kualitas umur simpan produk dan pemenuhan standar edar (PIRT).
3	Inovasi Kosmetologi	Formulasi kimia dasar untuk ekstraksi aloe vera gel menjadi sabun organik dan lotion. ⁶	Tim pengabdian masyarakat Universitas dan Aloe Vera Center.	Penetrasi ke pasar kecantikan (beauty and care market) dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi.

C. Fasilitasi Pemasaran, Afiriasi Sektor Hilir, dan Rantai Pasok

Produksi yang melimpah akibat keberhasilan intervensi sarana dan penyuluhan akan berubah menjadi bencana *over-supply* lokal jika tidak disertai dengan penyediaan muara penyerapan pasar yang memadai. Oleh karenanya, orkestrasi kebijakan Pemerintah Kota menukik jauh ke arah intervensi rekayasa pasar (*market creation*) dan fasilitasi pemasaran proaktif. Salah satu implementasi kebijakan yang paling mencolok secara visual adalah penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) berskala nasional yang dipusatkan di pelataran fasilitas *Aloe Vera Center* di Jalan Budi Utomo, (Gema Mahardhika, 2023) Keputusan penentuan lokasi ini merupakan manuver tata ruang yang sangat taktis. Alih-alih menyelenggarakan pasar murah di alun-alun kota, pemerintah menarik ribuan massa ke pusat ekosistem lidah buaya. Dengan membanjirnya warga untuk membeli komoditas beras atau minyak goreng bersubsidi, kelompok tani lidah buaya beserta para pelaku IKM setempat diberikan hak istimewa berupa *stand* pameran gratis untuk mempromosikan dan menjual langsung berbagai varian produk olahan mereka.

Lebih jauh lagi ke hulu, terdapat kebijakan afirmatif struktural yang menyasar ekosistem pariwisata. Pemerintah kota Pontianak menerbitkan instruksi berupa imbauan strategis yang ditujukan kepada seluruh elemen industri Jasa Boga termasuk di dalamnya jaringan perhotelan, manajemen restoran, dan kafe untuk mewajibkan penyediaan *welcome drink* (minuman penyambut tamu) atau kreasi menu *dessert* (hidangan penutup) yang berbahan dasar otentik lidah buaya Pontianak. Instrumen kebijakan ini diproyeksikan untuk menjembatani keterputusan akut antara sektor produsen hulu di wilayah utara dengan konsumen industri jasa di pusat kota yang gemerlap. Selain itu, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait secara reguler bertindak sebagai pialang atau *broker* komunikasi bisnis, memfasilitasi meja perundingan antara koperasi Gapoktan dengan manajemen perusahaan ritel dan *supermarket*. Negosiasi ini bertujuan agar produk-produk

olahan lidah buaya lokal yang telah mengantongi izin edar dapat masuk ke etalase rak pasar modern tanpa dibebani oleh *listing fee* komersial yang eksploitatif, (Ellyta, 2017)

D. Bantuan Akses Permodalan Inklusif Terintegrasi

Aspek kelangkaan kapital (*capital possibility*) tetap membayangi para petani, menjadi akar penghambat utama dalam mengakuisisi teknologi pasca-panen atau mengekspansi luasan lahan garapan. Menyikapi kelemahan struktural ini, intervensi permodalan yang digagas pemerintah tidak lagi mengandalkan mekanisme usang berupa pembagian uang tunai langsung (*cash transfer*) yang cenderung tidak mendidik. Kebijakan direkayasa untuk menciptakan sebuah ekosistem pembiayaan mikro yang inklusif dan bertanggung jawab.

Fasilitasi utama diwujudkan melalui kemudahan akses terhadap skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian. DPPP secara proaktif menjalin konsorsium kerja sama dengan berbagai institusi perbankan milik negara (Himbara). Tenaga PPL dialihfungsikan sebagian tugasnya untuk melakukan pendampingan pemberkasan administrasi bagi kelompok tani agar status keuangan mereka memenuhi kriteria kelayakan kredit (*bankable*). Para petani diberikan bimbingan teknis mengenai cara menyusun dokumen Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang rasional, transparan, dan terukur sebagai justifikasi pengajuan KUR berbunga rendah. Injeksi modal dari instrumen KUR ini dialokasikan secara khusus untuk menutup beban biaya awal (*sunk cost*) yang terlampau berat jika ditanggung sendiri oleh petani, seperti biaya land clearing untuk pembukaan kembali tutupan lahan gambut yang telah berubah wujud menjadi semak belukar selama bertahun-tahun masa pandemi.

Sebagai jaring pengaman tambahan, instrumen kebijakan juga menstimulasi kembali roda organisasi koperasi-koperasi unit desa yang secara eksklusif menaungi komoditas hortikultura lidah buaya, (Anggela, 2011) Melalui wadah koperasi komoditas ini, pemerintah pusat maupun daerah kerap menyalurkan dana bergulir berskala ultra-mikro. Keunggulan komparatif dari dana bergulir ini terletak pada prosedur pencairannya yang minim hambatan birokrasi, dirancang secara khusus untuk beroperasi sebagai *quick-response fund* yang dapat menyelamatkan petani ketika mereka terperosok ke dalam krisis arus kas jangka pendek sebelum masa panen tiba.

E. Analisis Evaluatif Efektivitas Intervensi Kebijakan

Dalam diskursus ilmu administrasi publik dan evaluasi kebijakan, untuk mengukur sebuah program dikatakan efektif atau tidak, kita harus membenturkannya dengan tujuan primer yang telah ditetapkan. Merujuk pada pandangan konseptual para ahli agronomi dan ekonomi pembangunan, pembangunan pertanian memiliki tiga sasaran fundamental: peningkatan produktivitas riil lahan, peningkatan kesejahteraan dan daya beli (*purchasing power*) petani, serta terciptanya stabilitas dan kepastian tata niaga pasar dalam ekstrapolasi jangka panjang.¹⁰

Berdasarkan parameter tersebut, paket kebijakan fisik jangka pendek secara khusus yang bermanifestasi dalam wujud pengadaan armada kendaraan *tossa* (motor roda tiga) dan penyaluran puluhan ribu bibit bersertifikat terbukti memperlihatkan **tingkat efektivitas yang sangat tinggi** pada dimensi psikologis dan pemulihan operasi mekanis dasar. Dalam kacamata sosiologi pedesaan, unit kendaraan operasional yang didistribusikan tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai sebuah alat transportasi mekanik yang terbuat dari baja dan roda. Bagi kelompok tani di pelosok lahan gambut Pontianak Utara, kendaraan tersebut beroperasi sebagai agen pemungkin struktural (*social enabler*) yang mengembalikan marwah, martabat, dan dorongan intrinsik petani untuk berjejaring kembali dengan ekosistem konsumen hilir di pusat kemewahan kota. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemecahan kebuntuan logistik

secara instan ini bertindak sebagai lokomotif penarik. Ketika gairah dan motivasi kolektif ini bangkit kembali, laju efektivitas penyerapan instrumen kebijakan lainnya, seperti antusiasme kehadiran dalam ruang-ruang pelatihan pasca-panen dan tingkat adopsi diseminasi teknologi, ikut mengalami akselerasi yang tajam secara berbanding lurus.

Di lain pihak, efektivitas pada dimensi penciptaan stabilitas harga dan penguatan integrasi rantai pasok dalam jangka panjang masih berada pada level yang **moderat atau ekuivalen parsial**. Upaya pemerintah daerah dalam "memaksa" integrasi hilirisasi melalui penerbitan instrumen berupa surat imbauan kepada segenap ekosistem perhotelan dan restoran (*HORECA*) memang memperlihatkan indikasi keberhasilan pada fase awal (*quick wins*). Namun demikian, kebijakan yang bersandar pada landasan normatif (imbau) ini memiliki kelemahan inheren, karena belum terlembagakan ke dalam struktur kontrak komersial yang mengikat secara yurisprudensi antara pihak *supplier* (gabungan kelompok tani) dan *buyer* (manajemen korporasi hotel). Para petani di akar rumput masih terus dihantui oleh sebuah postulat ekonomi rasional yang amat mendasar: "*Kami hanya memiliki motivasi untuk merevitalisasi lahan dan menanam kembali, apabila terdapat jaminan harga di pasaran yang secara proporsional sesuai dengan kalkulasi biaya produksi yang telah kami keluarkan*". Selama instrumen kebijakan publik yang dirancang belum memiliki daya gigit untuk menggaransi, mensubsidi, atau memediasi terbentuknya *floor price* (batas harga dasar terendah) yang menguntungkan di tingkat tengkulak besar maupun fasilitas industri pengolahan, maka bayang-bayang fluktuasi harga akan terus bergantung layaknya pedang Damocles di atas keberlangsungan ekonomi para petani lidah buaya.

Selanjutnya, langkah taktis menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menjadikan *Aloe Vera Center* sebagai lokus utamanya merupakan sebuah manuver tata ruang kebijakan yang sangat cerdas. Intervensi ini berhasil secara efektif menciptakan efisiensi spasial dan waktu: pemerintah daerah secara simultan menyelesaikan persoalan makroekonomi terkait meredam laju inflasi harga sembako di kalangan masyarakat urban, sembari di saat yang bersamaan berhasil merekayasa kehadiran sebuah *captive market* temporer bagi etalase produk olahan turunan lidah buaya buatan KWT setempat. Konsekuensi logisnya, serapan barang secara ritel mengalami lonjakan, dan eksposur merek (*brand exposure*) dari IKM lokal memperoleh keuntungan publikasi secara gratis.

No	Dimensi Intervensi Kebijakan	Output (Keluaran Langsung)	Outcome (Dampak Sosiologis & Ekonomi Jangka Pendek)	Evaluasi Tingkat Efektivitas & Justifikasi Analitis
1	Pembaruan Infrastruktur & Sarana	Penyerahan unit armada Tossa, distribusi bibit varietas unggul, dan subsidi pupuk kimia/organik.	Restorasi kemampuan mobilitas, pembersihan lahan gambut yang terbengkalai, dan dimulainya fase masa tanam baru.	Efektivitas Tinggi. Intervensi secara presisi menghancurkan bottleneck kelumpuhan logistik yang paling akut, sekaligus memantik restorasi motivasi fundamental petani. ³
2	Pendidikan & Kapasitas SDM	Lokakarya pengolahan limbah menjadi produk bernilai (kosmetik/lotion), sosialisasi mitigasi cuaca.	Kemunculan embrio startup IKM baru berbasis kearifan lokal, dan terwujudnya diversifikasi risiko ancaman gagal panen melalui pola multikultur.	Efektivitas Menengah hingga Tinggi. Transfer epistemologi pengetahuan (knowledge) sukses dilakukan, namun tingkat adopsi massal menuju tahap mekanisasi pascapanen menuntut masa kurva belajar yang lebih panjang. ⁷
3	Intervensi Fasilitasi Pasar	Pemusatan perhelatan GPM di Aloe Vera Center, Surat Edaran untuk sektor industri	Terciptanya traksi penjualan retail lokal berskala massal secara temporer, peningkatan	Efektivitas Moderat. Pendekatan ini berfungsi optimal sebagai katalis kampanye promosi, akan tetapi instrumen ini terbukti

		perhotelan (HORECA).	kesadaran brand lidah buaya Pontianak.	inkompeten dalam membentuk struktur supply chain contract jangka panjang yang imun terhadap fluktuasi. ³
4	Inklusi & Akses Pembiayaan	Bimbingan teknis pengajuan KUR, penguatan cadangan kas Koperasi Unit Desa.	Masuknya suntikan likuiditas modal untuk membiayai sunk cost pembersihan vegetasi sekunder pascapandemi.	Efektivitas Moderat. Kultur birokrasi perbankan formal dengan segala administrasinya seringkali bertransformasi menjadi tembok pembatas kultural bagi petani konvensional yang terbiasa dengan transaksi informal.

F. Faktor Pendukung Determinan Keberhasilan Kebijakan

Berdasarkan analisis silang terhadap serangkaian transkrip wawancara dan observasi fenomenologis, dapat dipetakan dengan gamblang beberapa faktor determinan yang bersifat struktural maupun kultural yang beroperasi sebagai pelumas akselerator atas keberhasilan operasionalisasi program CLBK:

Pertama, Modal Simbolik dan Konstruksi Identitas Merek (*Brand Identity*) yang Mengakar Kuat. Dalam perspektif kultural, komoditas lidah buaya bukan sekadar komoditas pertanian biasa yang diimpor dari luar; ia telah bertransformasi menjadi "DNA dan identitas genetik" dari sistem agribisnis Kota Pontianak. Predikat historis Kota Pontianak sebagai produsen lidah buaya raksasa dengan varietas *chinensis Baker* yang spesifik telah melahirkan *sense of pride* (kebanggaan komunal) yang mendalam. Konstruksi sosial ini luar biasa mempermudah pemerintah daerah dalam merekayasa dukungan publik yang masif, serta menarik atensi pro-aktif dari media massa lokal maupun nasional. Konstruksi narasi politik yang mengusung tema "mengembalikan masa kejayaan ekonomi kota" sangat resonan dan mudah dikonsumsi serta terinternalisasi oleh nalar sosiologis masyarakat luas.

Kedua, **Ketersediaan Jangkar Infrastruktur Fisik (*Anchor Infrastructure*).** Kepemilikan dan eksistensi *Aloe Vera Center* yang berlokasi strategis di Jalan Budi Utomo terbukti berfungsi jauh melampaui kapasitasnya sebagai monumen pasif atau kantor administrasi semata. Kompleks fasilitas terpadu ini telah meredefinisikan perannya menjadi episentrum aktivitas komunal sebuah ruang publik (*public sphere*) hibrida yang multifungsi. Kehadiran infrastruktur ini diorkestrasi dengan gemilang untuk memfasilitasi kebutuhan pelatihan hulu, pameran produk hilir, sentra agrowisata, hingga sebagai wadah raksasa penampung kerumunan massa program ekonomi makro seperti pasar murah (GPM). Dari kacamata ekonomi kelembagaan, eksistensi titik tumpu spasial yang terpusat ini berimplikasi langsung pada reduksi drastis biaya transaksi (*transaction cost*) yang harus ditanggung pemerintah daerah ketika berupaya mengonsolidasikan dan mendistribusikan program kepada gabungan kelompok tani yang letak lahannya tersebar secara sporadis.

Ketiga, **Transformasi Kesadaran Rasional Petani Terhadap Model Diversifikasi.** Fakta empiris yang menunjukkan tingginya tingkat penerimaan psikologis dan operasional kaum tani terhadap introduksi pola tanam multikultur misalnya dengan mengadopsi teknik integrasi tanaman pepaya ke dalam lajur-lajur budidaya lidah buaya merupakan sebuah sinyalemen tentang pencapaian tingkat kedewasaan literasi ekonomi mereka. Kaum petani ini telah secara sadar beradaptasi terhadap realitas ancaman risiko tunggal (*single risk collapse*) yang dibawa oleh pola tanam monokultur. Konsekuensi logis dari kedewasaan pola pikir ini adalah bahwa segala bentuk kurikulum materi penyuluhan modern yang dipropagandakan oleh penyuluh pertanian lapangan dari pemerintah dapat langsung diserap, diinternalisasi, dan diimplementasikan dengan sangat gesit tanpa diwarnai oleh drama resistensi kebudayaan

konservatif yang lazimnya menjadi momok dalam modernisasi sektor pertanian di negara berkembang.

Dalam realitas manajemen publik, optimisme cetak biru kebijakan akan selalu membentur berbagai friksi sistemik di atas hamparan lapangan implementasi. Terdapat sejumlah cacat struktural dan ganjalan birokrasi yang membelenggu pencapaian hasil maksimal dari intervensi DPPP Kota Pontianak, antara lain:

Pertama, **Disonansi dan Asimetri Sinergi Integrasi Hulu-Hilir (*Sumbatan Hulusasi-Hilirisasi*)**. Kesimpulan analitis paling tajam yang terekstraksi dari studi ini adalah terdeteksinya sebuah jurang struktural yang sangat menganga yang memisahkan antara kemampuan agregat produksi lahan di ujung hulu dengan kapasitas inovasi penyerapan di muara hilir. Meskipun narasi kebijakan yang digaungkan telah secara ambisius mendorong agenda diversifikasi produk turunan bernilai tinggi, semisal penciptaan bahan baku industri kosmetik skala global, kenyataan di lapangan berkata lain. Ekosistem manufaktur skala korporat menengah dan besar di wilayah Kota Pontianak ternyata sama sekali belum terkonsolidasi dengan matang untuk bersedia menyerap *raw material* (daun lidah buaya segar maupun olahan setengah jadi) dalam skala tonase massal secara kontinu. Profil penyerapan pasar mayoritas masih tersandera pada ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM) rumahan, industri rumah tangga pembuat jeli dan dodol. Entitas-entitas IKM mikro ini memiliki batasan absolut terkait modal, kapasitas teknologi pengemasan, dan limitasi logistik pengiriman antar pulau, yang pada akhirnya membatasi tingkat agregat penyerapan daun yang baru dipanen oleh para petani secara signifikan.

Kedua, **Inersia Birokrasi Lintas Sektoral dan Fenomena *Silo Mentality***. Agenda besar kebijakan revitalisasi sektor pertanian dalam ruang perkotaan adalah sebuah konstelasi masalah *wicked problem* yang mustahil dieksekusi secara soliter, sekuat apa pun determinasi yang dimiliki oleh instansi tunggal seperti DPPP. Implementasi holistik program ini secara mutlak menuntut terjadinya konvergensi operasional yang tajam dengan pelbagai institusi pemerintah lainnya, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) untuk perizinan dan tata niaga, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk integrasi paket agrowisata ke dalam brosur wisata regional, serta kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait dengan persoalan krusial tata kelola saluran tata air (drainase primer dan sekunder) guna menyeimbangkan neraca hidrologi lahan gambut. Kelambatan dalam melakukan sinkronisasi irama kerja antar-instansi ini acapkali menelurkan kebijakan yang terfragmentasi. Sebagai ilustrasi ironis di lapangan: para kelompok tani mungkin merayakan kesuksesan panen besar berkat intervensi presisi subsidi pupuk silang dari DPPP, namun kegembiraan ini seketika runtuh lantaran harga komoditas jatuh terjerembab akibat kegagalan operasi instrumen proteksi perlindungan pasar dari dinas perdagangan yang tidak responsif secara seketika (*real-time*).

Ketiga, **Hambatan Transisi Kultural dan Jebakan Demografi Petani (*Aging Farmers*)**. Kondisi demografis sektor agraris di Indonesia secara umum, yang manifestasinya juga sangat terang benderang terlihat di Kecamatan Pontianak Utara, tengah terjerat dalam isu serius terkait penuaan populasi angkatan kerja petani (*aging farmers*). Tingkat daya serap dalam mengadopsi instrumen teknologi baru entah itu pengoperasian mesin ekstraksi cairan *gel* mekanis berteknologi mutakhir, maupun pemanfaatan instrumen pemasaran komersial berbasis algoritma *digital marketing* untuk membuka portal *e-commerce* hasil komoditas berlangsung secara sangat asimetris di dalam internal kelompok tani. Tanpa kehadiran pendampingan fasilitator yang berdedikasi secara komprehensif, intensif, serta berkelanjutan, seluruh instrumen mesin dan peralatan pengolahan modern yang dihibahkan oleh pemerintah kepada kelompok tani memiliki kerentanan ekstrem untuk berakhir secara tragis hanya menjadi

benda pajangan yang mangkrak dan berkarat di sudut gudang-gudang koperasi akibat defisit kompetensi literasi teknis dan *digital gap* dari para penerimanya.

Bila ditarik ke dalam spektrum teori analisis kebijakan publik, metamorfosis pendekatan yang dipraktikkan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara substansial mencerminkan telah terjadinya pergeseran monumental dari rezim model pemerintahan regulasi ortodoks bergaya *command and control* (hierarkis), perlahan menuju kepada adaptasi konsep pemerintahan berbasis jaringan kemitraan multisektoral, atau yang di dalam literatur akademik lazim dikonseptualisasikan sebagai **tata kelola polisentris (polycentric governance)**. Skema intervensi ini tidak lagi sekadar mengandalkan pemaksaan legal melalui instrumen hierarkis kekuasaan aparatur negara. Akan tetapi, aparatur birokrasi telah mencoba mengeksplorasi pelibatan rasional dari mekanisme pasar independen (melalui insentif pelibatan entitas hotel, kafe, maupun ekosistem korporasi IKM) yang dikawinkan secara asimetris dengan eksploitasi potensi modal sosial partisipatif yang mengakar kuat di dalam rahim tradisi perkumpulan kelompok tani, (Ledjab et al., 2025)

Ketika dikaji lebih dalam dan disandingkan dengan parameter literatur metodologi dan diskursus pemberdayaan masyarakat pedesaan konvensional, konsep pemberdayaan secara tegas mendalilkan bahwa sebuah langkah intervensi dari entitas superordinat tidak boleh sama sekali dijerumuskan, direduksi maknanya, dan disederhanakan hanya menjadi sebuah transaksi amal berupa dermawan kapital (hibah transfer uang, pembagian subsidi sarana fisik yang membabituta). Pemberdayaan, dalam makna emansipatoris yang paling mendasar, adalah merupakan sebuah mekanisme proses praksis holistik dan pedagogis. Tujuannya adalah untuk mendobrak serta mentransformasi keseluruhan tatanan struktur ekosistem sosial dan ekonomi makro yang selama ini menjebak dan menindas (dalam studi kasus spesifik ini, belenggu penindasan tersebut termanifestasi dalam wujud asimetri informasi dengan kekuatan permainan harga dari para mafia tengkulak kartel daun segar, serta kelemahan mematikan akibat keterisolasian jalur mobilitas logistik armada dari lahan gambut pedalaman). Target akhir yang dibidik bukan sekadar pertumbuhan (*growth*), namun tercapainya sebuah tatanan kemandirian komunal yang terstruktur secara ajeg.

Dalam operasionalisasinya, inisiatif distribusi kendaraan armada distribusi roda tiga (*tossa*), dipadukan dengan strategi penciptaan ekosistem integrasi pasar vertikal tatap muka langsung (*direct selling*) yang difasilitasi melalui mekanisme perhelatan Gerakan Pangan Murah (GPM) raksasa, secara arsitektur konseptual telah berhasil mengaktualisasikan dan menerjemahkan bangunan teori pemberdayaan partisipatif ini ke dunia nyata. Secara brilian, aparatur pemerintah di level Kota Pontianak telah menyentuh fondasi paradigma teoretis dari filosof pemenang Nobel Ekonomi, Amartya Sen, yang mempopulerkan teori kapabilitas kebebasan: "**Capability to Function**". Mengacu pada dalil teori tersebut, kaum marginal petani bukan lagi diposisikan secara pasif sekadar dijejali uang tunai semata, melainkan esensi kebebasannya dipulihkan ketika mereka dipersenjatai secara sistematis dengan serangkaian kapabilitas struktural dasar. Kapabilitas tersebut berupa penguasaan hak milik atas sarana kendaraan mandiri, pemberian akses privilese tanpa biaya untuk mengokupasi ruang-ruang pemasaran (*stand*) komersial di ajang keramaian GPM tingkat kota yang bonafide, hingga transfer pencerahan ilmu pengetahuan epistemologi terkait resiliensi ketahanan pangan melalui model rekayasa budidaya pola tanaman ganda (*multikultur*). Hasil konvergensi dari penguasaan kapabilitas multi-dimensi ini memberikan keleluasaan, kepercayaan diri, serta otonomi kekuatan penawaran rasional dan kebebasan riil bagi individu maupun gabungan kelompok tani, demi meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) mereka untuk bertarung dan berpartisipasi meraup margin keuntungan langsung di dalam arena kompetisi pasar yang ruang lingkungannya menjadi jauh lebih luas dan menguntungkan.

Akan tetapi, meskipun orkestrasi pujian atas prestasi di atas diuraikan sedemikian rupa, kritisisme tajam dari kaca mata teori implementasi kebijakan publik khususnya yang direpresentasikan dengan amat relevan oleh pisau analisis model implementasi konseptual *Merilee S. Grindle* harus tetap didudukkan pada porsinya sebagai parameter penguji yang tak dapat dibantah. Grindle dengan tajam merumuskan postulat kritis bahwa sebuah tolok ukur fundamental penentu tingkat keberhasilan akhir manifestasi dari eksekusi implementasi kebijakan publik senantiasa berbanding lurus, dan ditentukan secara kausalitas, oleh dimensi kalkulasi seberapa drastis dan luas derajat perubahan esensial (*degree of change*) struktural yang dituntut oleh instrumen kebijakan tersebut, dikonfrontasikan dengan kalkulasi keseimbangan distribusi kekuatan pertarungan kekuasaan nyata di arena antar seluruh para aktor politik dan ekonomi yang berkepentingan langsung dengan intervensi.

Ketimpangan dominasi keseimbangan konstelasi peran relasional antara pemegang otoritas pembuat aturan program birokratis dengan posisi akar rumput selaku aktor pelaksana, serta ditambah dengan masih dangkalnya ruang saluran keterlibatan saluran komunikasi deliberatif dari arah bawah menuju atas (*bottom-up communication pattern*) dalam ranah penetapan parameter rancang bangun perencanaan hingga mekanisme evaluasi pertanggungjawaban program pasca panen, ditengarai sebagai sebuah ancaman defisit demokrasi yang dalam praktik jangka menengahnya kerap kali menjadi penyakit endemis yang menumpulkan, mendemotivasi, dan menghancurkan asas keberlanjutan daya hidup implementasi intervensi publik itu sendiri.

Adanya manifestasi nyata keluhan dan pernyataan kegundahan yang dikemukakan secara eksplisit, rasional, dan vokal oleh para representasi entitas petani—yang memberikan ultimatum tak tertulis menuntut adanya jaminan formal tingkat kesesuaian stabilitas batas terendah harga persetujuan beli komoditas daun di tingkat pasar bebas agar selalu mampu menghasilkan surplus minimal menutupi besaran laju inflasi pembengkakan biaya modal penggarapan pra-panen merupakan sebuah sinyal krisis (*strong policy signal*) dengan frekuensi ancaman tertinggi yang tidak boleh diabaikan. Fakta gejala akar rumput ini adalah alarm pengingat bagi para pejabat birokrasi pemerintahan bahwa peran intervensi negara secara imperatif sudah saatnya dituntut untuk tidak lagi hanya terbatas pada tugas penyediaan bimbingan teknis introduksi cara bercocok tanam varietas model anyar (*technology capability approach*), akan tetapi jauh lebih dalam dan drastis dari itu. Negara harus bersedia "mengotori tangannya" untuk hadir turun gunung mengambil tindakan tegas memecahkan dominasi pasar. Negara diwajibkan menyusun secara sistematis perancangan, intervensi rekayasa pengaturan kuota, penyediaan dana talangan kompensasi perlindungan guncangan iklim fluktuasi, dan mengkalibrasi instrumen regulasi kepastian rantai tata niaga komoditas agribisnis hulu-hilir komprehensif dari segala bentuk eksploitasi oligopoli (*market certainty formulation*).¹⁰ Kegagalan struktural instrumen representasi negara (baik instansi vertikal kementerian maupun institusi horizontal pemerintah daerah otonom) dalam menjamin kehadiran manifestasi konkrit pemberian *market certainty* tersebut akan menelan korban jiwa secara telak. Kegagalan fatal tersebut pada muaranya akan mendelegitimasi, melumpuhkan, serta memposisikan seluruh megah arsitektur program pemulihan makro inisiatif bertajuk "CLBK" beserta turunan subsidi hanya untuk direduksi tragis menjadi tak ubahnya sebuah ilusi kemeriahan seremonial perayaan *euforia* pemulihan populis yang bersifat semu, eksklusif, terlampau dangkal, dan akan selalu berada dalam kerentanan tertinggi terhadap probabilitas amukan potensi krisis gelombang guncangan fatal (*shock vulnerabilities*) makroekonomi atau epidemiologik di masa-masa turbulensi ketidakpastian iklim dekade yang akan datang.

PENUTUP



Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP), telah merumuskan arsitektur kebijakan intervensi yang taktis dan komprehensif guna menyelamatkan komoditas unggulan lidah buaya di Kecamatan Pontianak Utara dari guncangan krisis pascapandemi. Alih-alih bersifat parsial, manuver ini diorkestrasi dalam satu *grand design* terintegrasi yang ditopang oleh empat pilar fundamental: injeksi infrastruktur logistik (armada angkut dan bibit unggul), transformasi kapabilitas petani melalui adopsi teknologi ekstraksi dan pola tanam tumpang sari, perluasan penetrasi pasar melalui integrasi jaringan HOREKA, serta bimbingan restrukturisasi permodalan ultra-mikro. Pendekatan terstruktur ini terbukti secara empiris mampu membongkar apatisme psikologis petani, memicu kebangkitan drastis (*V-shape rebound*) yang ditandai dengan masifnya pembukaan lahan tidur dan melonjaknya eskalasi sirkulasi transaksi domestik di fase awal.

Meskipun fase pemulihan jangka pendek ini menorehkan keberhasilan yang terukur, kerangka kebijakan tersebut masih dihantui oleh cacat struktural laten yang rentan tergerus oleh disrupsi pasar oligopoli. Titik lemah paling fatal (*crucial weak point*) bersumber pada patologi disonansi birokrasi lintas instansi yang menghambat penciptaan ekosistem hilirisasi manufaktur berskala masif. Absennya instrumen pemerintah dalam menjamin perlindungan batas harga dasar (*price-floor guarantee*) di tengah melimpahnya tonase panen di sektor hulu, menempatkan petani pada posisi tanpa daya tawar. Akibatnya, keberhasilan masa transisi ini sewaktu-waktu dapat luluh lantak karena tingginya produktivitas tidak diimbangi dengan kepastian serapan pasar yang stabil dan menguntungkan.

Guna menambal celah pelemahan esensial yang mengancam fundamental kebijakan tersebut, diperlukan perumusan preskripsi turunan yang radikal, terukur, dan imperatif bagi Dewan Eksekutif Pemerintahan Kota Pontianak. DPPP selaku pemegang otoritas teknis diamanatkan untuk memimpin konvergensi lintas sektor dan memobilisasi seluruh sumber daya *stakeholder* terkait. Manuver rekomendatif ini harus difokuskan pada upaya konstruktif menjahit ulang simpul kritis rantai pasok, mengeksekusi transisi industrialisasi hilir secara paripurna, serta menciptakan regulasi proteksionisme harga demi menjamin resiliensi dan keberlanjutan ekonomi kelompok tani lidah buaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an. (2024). *Produksi Lidah Buaya Menurun, Pemkot Pontianak Galakkan Kembali Penanaman—Pontianak Post*. *Produksi Lidah Buaya Menurun, Pemkot Pontianak Galakkan Kembali Penanaman - Pontianak Post*. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1465258745/produksi-lidah-buaya-menurun-pemkot-pontianak-galakkan-kembali-penanaman>
- Aji, S. B. (2021). Peningkatan Kemampuan Budidaya Serta Diverifikasi Produk Hasil Olahan Lidah Buaya Pontianak (*Aloe Chinensis Baker*) Sebagai Upaya Pendukung Pelaksanaan Progam Hatinya PKK di Kelurahan Tamanan Kota Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(2), 201–208. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i2.4377>
- Ananda, H., & Zuhrotun, A. (2017). REVIEW: AKTIVITAS TANAMAN LIDAH BUAYA (*Aloe vera Linn*) SEBAGAI PENYEMBUH LUKA. *Farmaka*, 15(2), 82–89. <https://doi.org/10.24198/jf.v15i2.13011>
- Anggela, R. (2011). *PROSPEK USAHATANI LIDAH BUAYA (ALOE VERA) DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT* [Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial]. <http://library.fis.uny.ac.id>



- Ellyta. (2017). JARINGAN KOMUNIKASI PETANI DALAM PEMASARAN LIDAH BUAYA DI KALIMANTAN BARAT. *ZIRAA'AH MAJALAH ILMIAH PERTANIAN*, 42(1), 30–39.
- Gema Mahardhika. (2023). *Pemkot Pontianak Gelar Pangan Murah di Aloe Vera Center | Pemerintah Kota Pontianak*. <https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Pemkot-Pontianak-Gelar-Pangan-Murah-di-Aloe-Vera-Center>
- Harmanta. (2025). *Pemkot Pontianak Bangkitkan Kembali Pertanian Lidah Buaya—RRI.co.id*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://berita.rri.co.id/pontianak/regional/1996581/pemkot-pontianak-bangkitkan-kembali-pertanian-lidah-buaya>
- Hayati, R., Armadi, Y., & Al-Amin. (2025). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI SISTEM EKONOMI BERBASIS AGROINDUSTRI MODERN. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 5(2), 302–310. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1059>
- Ledjab, M. M., Kamariyah, S., Sholicah, N., & W, D. P. (2025). Efektivitas Program Pemberdayaan Petani Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Torok Golo, Kecamatan Rana Mese Manggarai Timur. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 130–140. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.285>
- Ningsih, A. M. M., & Ambarwati, N. S. S. (2021). Pemanfaatan Lidah Buaya (Aloe vera) Sebagai Bahan Baku Perawatan Kecantikan Kulit. *Jurnal Tata Rias*, 11(1), 91–100. <https://doi.org/10.21009/11.1.11.2009>
- Nuraini, N., Nurliza, N., & Imelda, I. (2018). ANALISIS PRODUK UNGGULAN OLAHAN LIDAH BUAYA DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal Sains Pertanian Equator*, 7(2). <https://doi.org/10.26418/jspe.v7i2.24568>
- Rivai, R. S., & Anugrah, I. S. (2016). *Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia*. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5317>
- Sihombing, Y. (2022). KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS INOVASI TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS DAN PENDAPATAN PETANI MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 6(1), 137–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7377>
- Wijaya, I. K. W. A., & Masfufatun, M. (2022). Potensi Lidah Buaya (Aloe vera) sebagai Antimikroba dalam Menghambat Pertumbuhan Beberapa Fungi: Literature Review. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 18(2), 202–211. <https://doi.org/10.24853/jkk.18.2.202-211>